



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

DAN PROGNOSES 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan Pasal 58 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Laporan Semester adalah Laporan realisasi dari bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan.

BAB II

REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran semester I tahun anggaran 2012 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	16.257.518.127,32	
b. Dana Perimbangan	355.350.500.138,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>5.028.815.195,34</u>	
Jumlah Pendapatan		376.636.833.460,66

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	118.256.045.101,00	
2) Belanja Bunga	0,00	
3) Belanja Subsidi	0,00	
4) Belanja Hibah	7.508.380.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
6) Belanja Bagi Hasil	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	4.524.215.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>200.000.000,00</u>	
		130.488.640.101,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	7.318.460.099,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	28.593.016.711,00	
3) Belanja Mocial	<u>22.106.656.461,00</u>	
		58.018.133.271,00
Jumlah Belanja		<u>188.506.773.372,00</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	244.076.680.479,45	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>242.076.680.479,45</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		430.206.740.568,11

Pasal 3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) semester I tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 430.206.740.568,11 terdiri dari :

a. Kas pada kas daerah	Rp. 425.375.251.070,11
b. Kas pada bendahara pengeluaran	<u>Rp. 4.831.489.498,00 (+)</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp. 430.206.740.568,11

Pasal 4

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya tahun anggaran 2012 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	13.044.308.980,68	
b. Dana Perimbangan	232.825.145.862,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>11.740.377.204,66</u>	
Jumlah Pendapatan		257.609.832.047,34

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	131.800.836.898,00	
2) Belanja Bunga	187.800.000,00	
3) Belanja Subsidi	1.394.000.000,00	
4) Belanja Hibah	41.147.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	1.544.000.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	1.400.000.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	18.262.785.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	
		155.430.568.898,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	21.709.497.236,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	221.372.941.136,00	
3) Belanja Modal	<u>183.490.179.702,00</u>	
		426.572.618.074,00
Jumlah Belanja		<u>574.759.092.403,00</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	106.214.512.643,45	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>1.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>104.714.512.643,45</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		(432.107.867.568,11)

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran semester I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Katingan ini.

Pasal 6

Ringkasan laporan realisasi anggaran semester I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Ringkasan laporan realisasi semester I (pertama) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Katingan ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 13 DESEMBER 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 13 DESEMBER 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO T. LADJU

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2012

No. Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi triwulan I	Realisasi semester I	Sisa Anggaran sampai dengan Semester I	%	keterangan
1	2	3	4	4			
	PENDAPATAN DAERAH	634,246,665,508.00	210,814,646,474.01	376,636,833,460.66	257,609,832,047.34	59.38	
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	29,301,827,108.00	8,005,103,650.01	16,257,518,127.32	13,044,308,980.68	55.48	
1.	Pajak Daerah	5,484,160,000.00	646,484,372.00	1,758,009,593.00	3,726,150,407.00	32.06	
1.	Retribusi Daerah	4,139,888,000.00	1,742,271,079.29	3,319,760,904.18	820,127,095.82	80.19	
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,600,000,000.00	0.00	2,958,744,075.96	(358,744,075.96)	113.80	
1. 1.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,077,779,108.00	5,616,348,198.72	8,221,003,554.18	8,856,775,553.82	-48.14	
	Dana Perimbangan	588,175,646,000.00	202,052,151,864.00	355,350,500,138.00	232,825,145,862.00	60.42	
1. 2.	Dana Bagi Hasil Pajak	32,400,000,000.00	6,483,032,448.00	15,707,661,111.00	16,692,338,889.00	-48.48	
1. 2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	35,585,181,000.00	17,636,200,916.00	24,485,524,234.00	11,099,656,766.00	68.81	
1. 2.	Dana Alokasi Umum	513,410,125,000.00	177,932,918,500.00	313,081,660,000.00	200,328,465,000.00	60.98	
1. 2.	Dana Alokasi Khusus	6,780,340,000.00	0.00	2,075,654,793.00	4,704,685,207.00	30.61	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,769,192,400.00	757,390,960.00	5,028,815,195.34	11,740,377,204.66	29.99	
1. 3.	Pendapatan Hibah	4,700,000,000.00	757,390,960.00	1,682,108,320.00	3,017,891,680.00	35.79	
1. 3.	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,456,692,400.00	0.00	3,346,706,875.34	7,109,985,524.66	32.01	
1. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,612,500,000.00	0.00	0.00	1,612,500,000.00	0.00	
1. 3.	Pendapatan yang Sah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Pendapatan	634,246,665,508.00	210,814,646,474.01	376,636,833,460.66	257,609,832,047.34	59.38	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2012

No. Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi triwulan I	Realisasi semester I	Sisa Anggaran sampai dengan Semester I	%	keterangan
		3		4			
2.	BELANJA DAERAH	770,261,957,344.00	61,832,592,943.00	188,506,773,372.00	581,755,183,972.00	24.47	
2.1	Belanja Tidak Langsung	285,919,208,999.00	50,029,178,371.00	130,488,640,101.00	155,430,568,898.00	45.64	
2.1.1	Belanja Pegawai	250,056,881,999.00	47,894,398,371.00	118,256,045,101.00	131,800,836,898.00	47.29	
2.1.2	Belanja Bunga	187,800,000.00	0.00	0.00	187,800,000.00	0.00	
2.1.3	Belanja Subsidi	1,394,000,000.00	0.00	0.00	1,394,000,000.00	0.00	
2.1.4	Belanja Hibah	7,549,527,000.00	2,134,780,000.00	7,508,380,000.00	41,147,000.00	99.45	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,544,000,000.00	0.00	0.00	1,544,000,000.00	0.00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1,400,000,000.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00	0.00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	22,787,000,000.00	0.00	4,524,215,000.00	18,262,785,000.00	19.85	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	0.00	200,000,000.00	800,000,000.00	20.00	
2.2	Belanja Langsung	484,342,748,345.00	11,803,414,572.00	58,018,133,271.00	426,572,618,074.00	11.98	
2.2.1	Belanja Pegawai	29,027,957,335.00	2,335,555,615.00	7,340,011,049.00	21,687,946,286.00	25.29	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249,965,957,847.00	9,327,394,042.00	28,571,465,761.00	221,394,492,086.00	11.43	
2.2.3	Belanja Modal	205,348,833,163.00	140,464,915.00	22,106,656,461.00	183,490,179,702.00	10.77	
2.2.3.1	Belanja Tanah	2,485,200,000.00	0.00	723,875,700.00	1,761,324,300.00	0.00	
2.2.3.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18,267,959,984.00	0.00	2,877,077,404.00	15,390,882,580.00	0.00	
2.2.3.3	Belanja Gedung dan Bangunan	33,522,965,461.00	0.00	277,339,750.00	33,245,625,711.00	0.00	
2.2.3.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144,319,451,178.00	0.00	18,100,589,607.00	126,218,861,571.00	0.00	
2.2.3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7,001,259,540.00	0.00	127,774,000.00	6,873,485,540.00	0.00	
2.2.3.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Dst	770,261,957,344.00	61,832,592,943.00	188,506,773,372.00	582,003,186,972.00	24.47	
	Jumlah Belanja	(136,015,291,836.00)	148,982,053,531.01	188,130,060,088.66	(324,393,354,924.66)	(138.32)	
	Surplus (Defisit)						

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2012






No. Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi triwulan I	Realisasi semester I	Sisa Anggaran sampai dengan Semester I	%	Keterangan
		3		4			
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	137.862.167.836.00	0.00	244.076.680.479.45	(106.214.512.643.45)		
3.1.1	Sal PA Tahun Anggaran Sebelumnya	137.862.167.836.00	0.00	242.802.576.804.42	(104.940.408.968.42)		
3.1.2	Pencurian dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.5	Penerimaan kembali Pembertaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	1.274.103.675.03	(1.274.103.675.03)		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	137.862.167.836.00	0.00	244.076.680.479.45	0.00		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500.000.000.00	0.00	2.000.000.000.00	1.500.000.000.00		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.500.000.000.00	0.00	2.000.000.000.00	1.500.000.000.00		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2.4	Pembertaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000.00	0.00	2.000.000.000.00	1.500.000.000.00		
	Pembayaan Netto	141.362.167.836.00	0.00	246.076.680.479.45	1.500.000.000.00		
3.3	Sal PA tahun berkenan	(1.653.124.000.00)	148.982.053.531.01	430.206.740.568.11	(432.107.867.568.11)	(26.023.86)	

Kasongan, Oktober 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

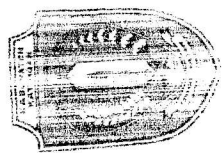
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI APBD STRUKTUR I
TAHUN ANGGARAN 2012

No. Urut	Uraian	3			4		Sisa Anggaran sampai dengan Semester I	%	keterangan
		Jumlah Anggaran	Realisasi triwulan I	Realisasi semester I	Realisasi semester I				
3	PEMBIAYAAN DAERAH								
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	137.862.167.836,00	0,00	244.076.680.479,45	(106.214.512.643,45)				
3.1.1.	Sil.P.A Tahun Anggaran Sebelumnya	137.862.167.836,00	0,00	242.802.576.804,42	(104.940.408.968,42)				
3.1.2.	Pencantutan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.5.	Penerimaan kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	1.274.103.675,03	(1.274.103.675,03)				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	137.862.167.836,00	0,00	244.076.680.479,45	0,00				
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00				
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.500.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00				
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00				
	Pembiayaan Netto	141.362.167.836,00	0,00	246.076.680.479,45	1.500.000.000,00				
3.3.	Sil.P.A tahun berkenan	(1.653.124.000,00)	148.982.053.531,01	430.206.740.568,11	(432.107.867.568,11)		(26,023,86)		

Kasongan, Oktober 2012

BUPATI KATINGAN

Duwel Rawing
DUWEL RAWING



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	39.325.107.108,00	16.257.113.127,32	(13.057.989.980,63)
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	5.481.600.000,00	1.758.000.593,00	(3.723.599.407,00)
1.1.1.01	Pajak Hotel	65.000.000,00	20.500.834,00	(44.497.166,00)
1.1.1.02	Pajak Restoran	482.287.000,00	411.543.365,00	(70.743.635,00)
1.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	41.800.000,00	(8.200.000,00)
1.1.1.04	Pajak Reklame	36.000.000,00	13.200.155,00	(22.799.845,00)
1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.320.000.000,00	728.450.448,00	(591.549.552,00)
1.1.1.07	Pajak Parkir	4.243.000,00	5.430.000,00	0,00
1.1.1.08	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
1.1.1.09	Pajak Sengking Burung Waele	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)
1.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	532.950.286,00	(2.467.049.714,00)
1.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Fundasari dan Parkir	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Bea Periklanan Hak Atas Tanah dan Bangunan	250.000.000,00	391.920.470,00	(141.920.470,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.142.368.000,00	3.319.760.904,15	(822.607.095,82)
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.766.400.000,00	2.658.000.326,15	(108.399.673,82)
1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	74.368.000,00	356.770.973,00	(318.102.973,00)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	662.584.000,00	305.225.600,00	(357.358.400,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.600.000.000,00	2.958.744.075,96	358.744.075,96
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/EUMD	2.600.000.000,00	2.958.744.075,96	358.744.075,96
4.1.3.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	0,00	0,00	0,00
4.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.101.059.108,00	8.221.003.554,18	(8.880.055.553,82)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan	348.280.000,00	751.479.244,00	403.199.244,00
4.1.4.02	Jasa Giro	6.010.195.352,00	3.236.014.814,00	(2.774.180.538,00)
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	7.842.238.462,00	2.128.755.942,24	(5.713.480.519,76)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00
4.1.4.05	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	0,00	0,00
4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	72.367.294,00	0,00	(72.367.294,00)
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	18.320.000,00	0,00	(18.320.000,00)
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	75.880.000,00	60.000,00	(75.820.000,00)
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jamiran	683.780.000,00	5.827.500,00	(677.952.500,00)
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	2.050.000.000,00	2.085.891.053,94	35.891.053,94
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.2	Dana Perimbangan	538.175.646.000,00	355.350.500.138,00	(232.825.145.862,00)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	67.985.181.000,00	40.193.185.345,00	(27.791.995.655,00)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
	2	3	4	5
1				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	32.400.000.000,00	15.707.661.111,00	(16.692.338.889,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35.585.181.000,00	24.485.524.234,00	(11.099.656.766,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	513.410.125.000,00	313.081.660.000,00	(200.328.465.000,00)
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	513.410.125.000,00	313.081.660.000,00	(200.328.465.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	6.780.340.000,00	2.034.102.000,00	(4.746.238.000,00)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	6.780.340.000,00	2.034.102.000,00	(4.746.238.000,00)
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	41.552.793,00	41.552.793,00
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	41.552.793,00	41.552.793,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.769.192.400,00	5.028.815.195,34	(11.740.377.204,66)
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.700.000.000,00	1.682.108.320,00	(3.017.891.680,00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.700.000.000,00	1.682.108.320,00	(3.017.891.680,00)
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0,00	0,00	0,00
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.2.01	Panangulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.456.692.400,00	3.346.706.875,34	(7.109.985.524,66)
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	10.456.692.400,00	3.346.706.875,34	(7.109.985.524,66)
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	0,00	0,00	0,00
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.612.500.000,00	0,00	(1.612.500.000,00)
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	1.612.500.000,00	0,00	(1.612.500.000,00)
4.3.5.02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	0,00	0,00	0,00
4.3.5.03	Bantuan Keuangan Dari Kota	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.34.269.945.508,00	376.636.833.460,66	(257.633.112.047,34)
5	BELANJA			
5.1	Belanja Tidak Langsung	295.870.416.499,00	130.488.640.101,00	(165.381.776.398,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	254.704.661.999,00	118.256.045.101,00	(136.448.616.898,00)
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	202.362.970.825,00	104.277.993.776,00	(98.085.067.049,00)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	30.881.581.000,00	7.757.100.425,00	(23.124.480.575,00)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.696.700.000,00	780.000.000,00	(916.700.000,00)
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak	625.000.000,00	363.430.000,00	(261.520.000,00)
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	105.959.774,00	0,00	(105.959.774,00)
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	186.105.400,00	0,00	(186.105.400,00)
5.1.1.07	Belanja Penghasilan Lainnya	18.846.345.000,00	5.077.560.900,00	(13.768.784.100,00)
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.3.01	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	14.434.754.500,00	7.508.380.000,00	(6.926.374.500,00)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.4.02	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUW/DIBUMIN	0,00	0,00	0,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	14.434.754.500,00	7.508.380.000,00	(6.926.374.500,00)
5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.4.08	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.544.000.000,00	0,00	(1.544.000.000,00)
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.544.000.000,00	0,00	(1.544.000.000,00)
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	814.604.000,00	0,00	(814.604.000,00)
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	585.396.000,00	0,00	(585.396.000,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.787.000.000,00	4.524.215.000,00	(18.262.785.000,00)
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	1.727.000.000,00	345.000.000,00	(1.382.000.000,00)
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Femerintahan Desa Lainnya	20.500.000.000,00	4.179.215.000,00	(16.320.785.000,00)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.000.000,00	0,00	(560.000.000,00)
5.1.8	Belanja Tidak Terjaga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	(800.000.000,00)
5.1.8.01	Belanja Tidak Terjaga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	(800.000.000,00)
5.2	Belanja Langsung	535.663.408.432,82	58.018.133.271,00	(497.645.275.161,82)
5.2.1	Belanja Pegawai	29.626.045.185,00	7.338.661.049,00	(22.287.384.136,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.033.172.270,00	900.000,00	(1.032.272.270,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.770.630.715,00	7.108.000.249,00	(19.662.630.466,00)
5.2.1.03	Uang Lembur	1.703.052.200,00	206.510.800,00	(1.496.541.400,00)
5.2.1.04	Honorarium Pengeolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	119.250.000,00	23.250.000,00	(96.000.000,00)
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	251.968.336.934,82	28.572.815.761,00	(223.395.521.173,82)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.776.207.719,54	1.597.141.698,00	(12.179.066.021,54)
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	129.920.265.424,00	686.833.310,00	(129.233.432.114,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.525.567.647,88	3.358.853.613,00	(11.166.734.034,88)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	357.500.000,00	20.955.531,00	(336.544.469,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.960.435.506,00	1.501.533.477,00	(3.458.902.029,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.738.173.970,80	1.737.975.680,00	(6.000.198.290,80)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.390.731.000,00	382.043.500,00	(1.008.687.500,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.541.345.400,00	519.403.400,00	(1.021.942.000,00)
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	564.377.500,00	192.799.068,00	(371.578.432,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.655.062.009,84	3.523.540.250,00	(8.131.521.759,84)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	229.000.000,00	0,00	(229.000.000,00)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.006.585.300,00	34.725.000,00	(971.860.300,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	780.329.600,00	269.768.000,00	(510.561.600,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.114.876.555,00	11.022.763.734,00	(15.092.112.821,00)
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.353.500.000,00	30.000.000,00	(1.323.500.000,00)
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.606.424.000,00	2.952.201.175,00	(3.654.222.825,00)
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	172.800.000,00	0,00	(172.800.000,00)
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	1.047.000.000,00	180.495.000,00	(866.505.000,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.092.791.472,76	495.523.325,00	(4.597.268.147,76)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.778.904.200,00	58.250.000,00	(9.720.654.200,00)
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.324.398.629,00	7.000.000,00	(13.317.398.629,00)
5.2.2.24	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
5.2.2.25	Biaya Uji Laboratorium	32.038.000,00	960.000,00	(31.078.000,00)
5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal	274.069.026.313,00	22.106.656.461,00	(251.962.369.852,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Perjandaan Tanah	4.362.090.000,00	723.875.700,00	(3.638.214.300,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	8.185.070.155,00	0,00	(8.185.070.155,00)
5.2.3.04	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	155.250.000,00	0,00	(155.250.000,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor	410.000.000,00	74.250.000,00	(335.750.000,00)
5.2.3.06	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.3.07	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00
5.2.3.08	Belanja Modal Perjandaan Alat-Alat Bengkel	411.138.200,00	129.274.500,00	(281.863.700,00)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	833.498.005,00	5.500.000,00	(827.998.005,00)
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	459.715.500,00	96.112.250,00	(363.603.250,00)
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	1.050.363.298,00	132.213.154,00	(918.150.144,00)
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.219.565.187,00	385.846.500,00	(1.833.718.687,00)
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.538.271.450,00	87.935.000,00	(1.450.336.450,00)
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	225.907.559,00	37.035.000,00	(188.822.559,00)
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Pehhias Ruangan Rumah Tangga	14.245.000,00	3.245.000,00	(11.000.000,00)
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	430.615.000,00	147.365.000,00	(283.250.000,00)
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	26.351.880,00	11.300.000,00	(15.051.880,00)
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	699.003.000,00	21.640.000,00	(677.360.000,00)
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	654.042.000,00	0,00	(654.042.000,00)
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.533.612.468,00	1.684.060.000,00	(849.552.468,00)
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	174.943.343.478,00	12.096.747.946,00	(162.846.595.532,00)
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7.880.003.000,00	5.956.377.626,00	(1.923.622.374,00)
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaminan Air	7.420.230.000,00	18.239.636,00	(7.401.990.364,00)
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.363.890.200,00	29.224.400,00	(4.334.665.800,00)
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	48.804.124.111,00	314.030.750,00	(48.490.093.361,00)
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.972.325.302,00	2.510.000,00	(5.969.815.302,00)
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Pecorak Kesenian, Kebudayaan	80.300.000,00	22.330.000,00	(57.970.000,00)
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	103.200.000,00	102.834.000,00	(366.000,00)
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Panserjatan/Kearifan	273.332.500,00	16.500.000,00	(256.832.500,00)
5.2.3.31	Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	20.200.000,00	5.000.000,00	(15.200.000,00)
	JUMLAH BELANJA	851.533.824.931,82	188.506.773.372,00	(663.027.051.559,82)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(217.263.879.423,82)	188.130.060.088,66	405.393.939.512,48
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	137.862.167.836,00	244.076.630.479,45	106.214.512.643,45
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	137.862.167.836,00	242.802.576.804,42	104.940.408.968,42
6.1.1.01	Pelaksanaan Penyerahan PAD	0,00	0,00	0,00
6.1.1.02	Pelaksanaan Penyerahan Dana Pembangan	0,00	0,00	0,00
6.1.1.03	Pelaksanaan Penyerahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sifat	0,00	0,00	0,00
6.1.1.04	Sisa Penyempulanan Belanja Atau Akumulasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.1.1.05	Kewajiban Kepala Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Fasilitasi	0,00	0,00	0,00
6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.862.167.836,00	242.802.576.804,42	104.940.408.968,42
6.1.2	Pencarian Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.2.01	Pencarian Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.3.01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00
6.1.3.02	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Yang Dikerjasamaikan Dengan Pihak Ke	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
6.1.4.05	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	1.274.103.675,03	1.274.103.675,03
6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pencapaian Daerah	0,00	1.274.103.675,03	1.274.103.675,03
6.1.6.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
6.1.6.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
6.1.6.04	Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
6.1.6.05	Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
6.1.7.01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.862.167.836,00	244.075.630.479,45	106.214.512.643,45
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertihan Modal Investasi Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)
6.2.2.01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)	0,00	0,00	0,00
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)
6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
6.2.2.04	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah/ Lain	0,00	0,00	0,00
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
6.2.3.09	Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.3.10	Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pembelian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.4.01	Pembelian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00
6.2.4.02	Pembelian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	134.362.167.836,00	242.076.680.479,45	107.714.512.643,45
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(82.901.711.587,82)	430.206.740.568,11	513.108.452.155,93

Kasangan, 2012
BUFATI



DUWEL RAWING



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.325.107.108,00	16.257.516.127,32	13.067.588.980,68	13.072.831.383,68	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.481.600.000,00	1.738.009.593,00	3.743.590.407,00	3.738.393.107,00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.142.388.030,00	3.319.760.904,15	822.627.065,85	822.627.065,82	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2.600.000.000,00	2.938.744.075,36	6.587.411.075,64	6.587.744.075,60	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	17.101.053.108,00	8.231.003.554,15	8.869.555.553,82	8.820.255.333,82	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	588.175.646.000,00	355.330.500.138,00	232.825.145.862,00	232.825.145.862,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	438.175.646.000,00	355.330.500.138,00	232.825.145.862,00	232.825.145.862,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	32.400.000.000,00	15.707.661.111,00	16.692.338.889,00	16.692.338.889,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak (Sisa Laba Daerah)	35.580.000.000,00	24.485.534.234,00	11.099.656.766,00	11.099.656.766,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	613.410.000.000,00	313.091.680.000,00	200.328.465.000,00	200.328.465.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	6.780.000.000,00	2.034.102.000,00	4.745.900.000,00	4.745.900.000,00	
1.2.1.5	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.552.793,30	1.552.793,30	1.552.793,30	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Dana Penyetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	16.769.192.400,00	5.028.815.195,34	11.740.377.204,66	11.740.377.204,66	
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.700.000.000,00	4.612.108.320,00	3.317.891.660,00	3.317.891.660,00	
1.3.2	Pendapatan Dana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.069.192.400,00	336.706.875,34	8.422.485.544,66	8.422.485.544,66	
JUMLAH PENDAPATAN		634.269.945.508,00	376.646.833.460,66	257.613.112.047,34	248.133.209.165,34	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	575.064.798.618,82	166.200.116.911,00	408.864.681.707,82	408.864.681.707,82	
2.1.1	Belanja Pegawai	294.330.707.184,00	125.591.706.150,00	158.736.001.033,00	158.736.001.033,00	
2.1.2	Belanja Barang	251.968.836.934,82	28.572.815.761,00	223.395.521.173,82	223.395.521.173,82	
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Sulfid	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	14.434.754.500,00	7.506.330.000,00	6.926.374.500,00	6.926.374.500,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.544.000.000,00	0,00	1.544.000.000,00	1.544.000.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Ketinggian	22.787.000.000,00	4.521.215.000,00	18.265.785.000,00	18.265.785.000,00	
2.2	BELANJA MODAL	274.069.026.313,00	22.106.656.461,00	251.962.369.852,00	251.962.369.852,00	
2.2.1	Belanja Tanah	4.362.900.000,00	723.875.700,00	3.638.214.300,00	3.638.214.300,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.139.318.222,00	2.843.326.104,00	17.295.991.818,00	17.295.991.818,00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.804.124.111,00	311.090.750,00	48.490.033.361,00	48.490.033.361,00	
2.2.4	Belanja Jalan, Angkasa dan Jembatan	194.607.468.678,00	18.109.539.607,00	176.406.879.071,00	176.406.879.071,00	
2.2.5	Belanja Asst Tetap Lainnya	6.155.620.302,00	127.74.000,00	6.027.751.302,00	6.027.751.302,00	
2.2.6	Belanja Asst Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
2.4	TRANSFER	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Bagi Hasil dan Bantuan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	851.533.824.931,82	188.506.773.372,00	663.027.051.559,82	663.027.051.559,82	
3	PEMBIAYAAN					
	SURPLUS / DEFISIT	(217.263.079.423,82)	188.130.060.088,06	(405.393.939.512,43)	(638.243.842.314,43)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Pergunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	137.862.167.836,00	242.802.576.804,12	(104.940.408.968,42)	137.862.167.836,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Perorangan Bantuan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Perorangan Kembali Pemberian Bantuan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Perorangan Uang Daerah	0,00	1.271.193.675,33	(1.271.036.675,63)	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.862.167.836,00	244.073.770.479,45	(106.214.512.643,43)	137.862.167.836,00	
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Pembelian dan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyelesaian utang piutang Daerah	3.500.000.000,00	2.063.040.000,00	1.436.960.000,00	3.500.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Pajak Uraian	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Pembelian Prediaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00	2.063.040.000,00	1.436.960.000,00	3.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	134.362.167.836,00	242.010.730.479,45	(107.714.512.643,43)	134.362.167.836,00	
3.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	(12.901.711.587,82)	430.205.740.568,11	(513.108.452.155,93)	(638.273.842.374,48)	

Kasoran 2012

EUPAT

Jawin
DIJWEL RAVING